

BAB I

TANTANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.1. KONDISI UMUM

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (*The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya.

Sejalan dengan amanat di atas, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka panjang adalah terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai yang didukung oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa kumuh.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, selama periode tahun 2005–2009 Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan berbagai program pembangunan perumahan dan permukiman sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kemenpera 2005–2009. Pencapaian program pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat selama tahun 2005–2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Iklim yang Kondusif dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman**, melalui:
 - a. Penyiapan Draft Rancangan Perubahan UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun serta penyiapan Revisi PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (LISIBA BS);
 - b. Pengembangan Norma, Standar, Peraturan dan Manual sebanyak 76 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat;

- c. Pengembangan kebijakan percepatan pembangunan rumah susun sederhana melalui Keppres No. 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan (PPRSKP) yang ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Pelaksana dan Pokja di tingkat Pusat serta Tim Koordinasi Daerah di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Pengembangan insentif fiskal dan kemudahan dalam pembangunan perumahan antara lain berupa pembebasan PPN dan penetapan PPH Final 1% untuk pembangunan RSH dan Rusuna, pedoman pengadaan tanah dan penetapan nilai jual tanah Negara untuk pembangunan Rusuna, serta pedoman bagi Pemerintah Daerah tentang kemudahan perijinan dan insentif dalam pembangunan rusuna; dan
 - e. pengembangan pembiayaan sekunder perumahan.
2. **Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Para Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman**, melalui:
- a. Pengembangan kerjasama kelembagaan dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) serta penyiapan revitalisasi Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N); dan
 - b. Pemberdayaan pelaku pembangunan perumahan swadaya serta Bimbingan Teknik/Bantuan Teknik, pendampingan dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di bidang perumahan, baik kepada Pemda, masyarakat, dan lembaga keuangan bank dan non bank.
3. **Meningkatkan Pendayagunaan Sumberdaya Perumahan dan Permukiman**, melalui:
- a. Standarisasi dan pengembangan sistem modular untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas bangunan;
 - b. Pemanfaatan lahan, khususnya tanah Pemerintah/BUMN/BUMD untuk pembangunan Rumah Susun Sederhana; dan
 - c. Penerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan produksi bahan bangunan lokal yang murah serta konstruksi bangunan tahan gempa.
4. **Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman**, melalui:
- a. pembangunan rumah baru layak huni yang terdiri dari RSH Bersubsidi, RSH dan RS Non Subsidi, Rumah Khusus, serta Rumah Pasca Bencana sebanyak 1.241.118 unit;
 - b. Pembangunan Rusunawa sebanyak 37.709 unit;
 - c. Pembangunan Rusunami dengan peran serta swasta sebanyak 6.716 unit;
 - d. Pembangunan perumahan swadaya sebanyak 3.659.037 unit; dan
 - e. Penataan kawasan skala besar dan kawasan khusus sebanyak 8.182 Ha.

Dalam rangka identifikasi kebutuhan dan pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman, Kementerian Perumahan Rakyat juga memperhatikan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, Kementerian Perumahan Rakyat telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan

partisipasi berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan dunia usaha, antara lain berupa *Focused Group Discussion* (FGD), Workshop, Serial Diskusi serta Kongres Perumahan dan Permukiman II Tahun 2009. Kongres tersebut dihadiri oleh 1.645 peserta dari unsur Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bank, LKnB, LKM, Koperasi, BUMN, BUMD, LSM, Perguruan Tinggi, Pengembang, Asosiasi/Organisasi di bidang pembangunan perumahan dan permukiman serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil kongres telah dituangkan dalam Deklarasi dan Agenda Menyongsong Era Baru Pembangunan Perumahan dan Permukiman Indonesia yang ditandatangani oleh 44 orang perwakilan Pemerintah Provinsi, pemangku kepentingan dan Kementerian Perumahan Rakyat. Hal-hal penting yang dihasilkan dalam Kongres tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan sebagian APBN dan APBD untuk memberikan bantuan, stimulan bidang perumahan bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu;
2. Mengupayakan kartu keluarga miskin berlaku untuk memberikan kemudahan keluarga miskin mendapatkan IMB, atau hal yang terkait dengan administrasi pembangunan rumahnya;
3. Mengupayakan peningkatan penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman ditingkat daerah;
4. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat;
5. Mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan perumahan dan permukiman;
6. Mengalokasikan minimum 1% APBN/APBD yang dapat menjadi pengungkit perwujudan hunian yang layak;
7. Mengupayakan pemupukan dana dari berbagai sumber penyediaan anggaran bagi percepatan pembangunan perumahan (baik dari APBN/D, bantuan luar negeri, dan pihak swasta);
8. Pelembagaan Dana Alokasi Khusus Perumahan;
9. Peningkatan subsidi dan insentif dalam pembangunan perumahan bagi MBR yang tepat sasaran;
10. Pemberian prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada kawasan yang membangun rumah MBR;
11. Pengoptimalan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;
12. Meningkatkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;
13. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat; dan
14. Mengembangkan perusahaan-perusahaan publik dan badan-badan di daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pembangunan perumahan dan permukiman.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sehingga perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perumahan dan permukiman tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri. Disamping itu, pembangunan perumahan juga akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta penciptaan lapangan kerja.

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan untuk mendorong dan memperkuat demokrasi ekonomi serta memberikan kesempatan yang sama dan saling menunjang antara badan usaha negara, koperasi, dan swasta berdasarkan asas kekeluargaan. Pembangunan di bidang perumahan dan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta. Disamping itu, upaya peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman juga perlu didukung dengan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaannya.

Sejalan dengan peran serta masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan permukiman, Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam wujud pengaturan dan pembimbingan, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan dan kemudahan, penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait antara lain tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia serta peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok yaitu keterbatasan penyediaan rumah, meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, serta permukiman kumuh yang semakin meluas. Berikut, uraian permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

1. **Keterbatasan penyediaan rumah.** Pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri. Sepanjang periode 2005–2009, pertambahan rumah tangga baru mencapai 3,6 juta. Hal ini tidak mampu diikuti dengan pembangunan rumah baru yang mencapai 2,5 juta unit. Kondisi tersebut masih ditambah dengan adanya 555.000 unit rumah dengan kondisi rusak berat yang tidak dapat dihuni, sehingga kekurangan rumah (*backlog*) diperkirakan meningkat dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,4 juta pada akhir tahun 2009. Peningkatan jumlah *backlog* tersebut masih lebih rendah dibandingkan prediksi pada RPJMN tahap pertama yang memperkirakan pertumbuhan *backlog* akan mencapai 11,6 juta pada akhir 2009 apabila tidak dilakukan penanganan;
2. **Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai.** Pada tahun 2009, 4,8 juta unit rumah diperkirakan dalam kondisi rusak yakni rumah dengan dua dari tiga struktur dasarnya (dinding, lantai,

dan atap) memerlukan perbaikan. Selain itu, menurut Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2008, sebanyak 13,8% rumah tangga masih menghuni rumah dengan lantai tanah, 12,4 % dengan dinding belum permanen, dan 1,2 % tinggal di rumah yang beratapkan daun. Selain masalah kondisi rumah, kualitas suatu rumah juga diukur dengan tingkat aksesibilitas terhadap prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), seperti ketersediaan air bersih, listrik dan jamban. Pada tahun 2007, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sebanyak 21,1% rumah tangga di Indonesia belum dapat mengakses air bersih, sebanyak 8,54% rumah tangga masih belum mendapatkan sambungan listrik dan sebanyak 22,85% rumah tangga tidak memiliki akses terhadap jamban. Tingginya jumlah masyarakat yang tinggal di rumah yang belum memenuhi standar layak huni menjadi indikasi mengenai kondisi perekonomian masyarakat yang masih lemah, sehingga tidak mampu secara swadaya melakukan perbaikan ataupun peningkatan kualitas atas kondisi rumah tempat tinggalnya. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dari pemerintah dalam upaya peningkatan kondisi perumahan dengan mengintegrasikan aspek fisik bangunan, lingkungan dan fasilitas pendukungnya;

3. Permukiman kumuh yang semakin meluas. Tekanan kebutuhan pembangunan perumahan telah bergeser ke wilayah perkotaan sebagai dampak dari urbanisasi. Jumlah penduduk perkotaan sudah mencapai lebih dari 50% dari total penduduk nasional dengan konsentrasi pertumbuhan di kota-kota besar dan metropolitan. Luas lahan perkotaan yang terbatas tidak mampu menampung desakan pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap memunculkan permukiman yang tidak teratur, kumuh, dan tidak layak huni. Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luas. Hasil penelitian *United Nation Development Programme* (UNDP) mengindikasikan terjadinya perluasan permukiman kumuh mencapai 1,37% setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2009 luas permukiman kumuh diperkirakan menjadi 57.800 Ha dari kondisi sebelumnya yakni 54.000 Ha pada akhir tahun 2004.

Permasalahan pokok di atas disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut:

1. **Regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman.** Sampai saat ini masih banyak regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman yang perlu direvisi dan dilengkapi agar selaras dengan perkembangan lingkungan strategis dan kebijakan pembangunan nasional, antara lain UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (KASIBA/LISIBA BS), PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Bagi Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, PP No. 31 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan PP No. 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);

Khususnya yang terkait dengan kebijakan otonomi daerah, masih banyak NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang perlu dilengkapi dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di samping itu, regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh

instansi yang berbeda masih belum terintegrasi dengan baik untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman secara terpadu;

2. **Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan.** Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, cenderung menempati hunian di pinggiran kota yang jauh dari lokasi pekerjaan serta menimbulkan permukiman liar di daerah perkotaan;
3. **Lemahnya kepastian bermukim (*secure tenure*).** Pada akhir tahun 2007 masih terdapat 22,06% rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri namun belum didukung oleh bukti hukum berupa sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), girik, maupun akta jual beli. Tingginya biaya proses pengurusan di lapangan serta keterbatasan informasi terhadap prosedur sertifikasi dan rencana tata ruang mengakibatkan sebagian masyarakat menempati rumah tanpa memiliki bukti legalitas pemanfaatan lahan dan bangunan. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan ketidaksesuaian terhadap rencana tata ruang sehingga rawan mengalami penggusuran;
4. **Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah.** Menurut data BPS tahun 2007, sebanyak 98% rumah tangga di Indonesia merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, dimana sebanyak 91% merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, yang memiliki keterbatasan daya beli. Selain itu, sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dan tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kesulitan untuk mengakses kredit perumahan yang disediakan oleh perbankan. Di sisi lain, sumber pendanaannya pun sangat terbatas karena hanya mengandalkan dana yang bersumber dari bank dan pemerintah. Padahal masih banyak alternatif sumber pembiayaan yang dapat dikembangkan, antara lain melalui tabungan perumahan nasional, kerjasama pemerintah-swasta dan sumber-sumber dana jangka panjang seperti Jamsostek, Taspen, dana pensiun dan tabungan perumahan lainnya yang sejenis. Namun, sampai saat ini sumber-sumber dana jangka panjang tersebut belum dapat dimobilisasi untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah-bawah sebagai dana murah jangka panjang. Hal ini masih terkendala oleh regulasi yang mengatur pemanfaatan sumber-sumber dana tersebut;
5. **Belum efisien pasar primer dan belum berkembang pasar sekunder perumahan.** Pembiayaan perumahan yang berkelanjutan harus didukung oleh pasar primer dan sekunder yang sehat. Namun, saat ini kinerja pasar primer masih belum efisien karena masih ada komponen biaya tinggi dalam pembangunan perumahan khususnya dalam perijinan. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan pasar perumahan karena biaya tersebut akan diteruskan kepada konsumen sehingga semakin menjauhkan keterjangkauan masyarakat terhadap harga yang ditawarkan. Selain itu, prosedur dan jenis perijinan yang belum terstandarisasi semakin menambah ketidakpastian bagi para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman. Di samping itu, kendala lainnya adalah sumber pendanaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih bertumpu pada dana pihak ketiga yang bersifat jangka pendek sehingga terjadi ketidaksesuaian antara sumber pendanaan dengan pemanfaatan yang bersifat jangka panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah melembagakan pembiayaan sekunder perumahan melalui pendirian PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF). Namun operasionalisasi PT. SMF masih terkendala oleh regulasi sehingga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan;

6. **Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman.** Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa pembangunan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Namun hal ini belum disertai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun perangkat organisasi untuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang - perumahan. Selain itu, koordinasi antar lembaga, baik di tingkat Pusat maupun Daerah belum berjalan dengan baik. Pemerintah telah berupaya membentuk Badan Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N), namun pada pelaksanaannya belum berfungsi secara efektif;
7. **Belum optimal pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman.** Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan swasta. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya belum disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun/ memperbaiki rumah. Sedangkan partisipasi swasta dalam pembangunan perumahan masih harus ditingkatkan antara lain melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu, sumber daya lokal, arsitektur dan teknologi serta hasil penelitian di bidang perumahan dan permukiman belum dimanfaatkan secara optimal.
8. **Kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk:**
 - a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia;
 - b. ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
 - c. mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara; dan
 - e. mendorong iklim investasi asing.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Dengan memperhatikan amanat peraturan perundangan, hasil pencapaian pembangunan perumahan pada periode sebelumnya, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta aspirasi berbagai pemangku kepentingan, maka ditetapkan Visi Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010–2014 yaitu **Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni.**

Pencapaian visi tersebut memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman mengingat intensitas dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani. Kementerian Perumahan Rakyat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pencapaian visi tersebut memiliki kewenangan sebagai regulator, fasilitator maupun pelaksana pembangunan perumahan sehingga terpenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi setiap keluarga Indonesia.

2.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010–2014 sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai;
3. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan dan kawasan permukiman secara optimal;
5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

2.3. TUJUAN

1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
3. Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur;
4. Memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai;
5. Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh;
6. Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan;
7. Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
8. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
9. Mendorong peran dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
10. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

2.4. SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya: (i) Revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menjadi UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, (ii) Revisi UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, (iii) Revisi PP No. 80 Tahun 1999 tentang KASIBA/LISIBA BS, (iv) Revisi PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian bagi Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia,

(v) Revisi PP No. 31 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN, (vi) Revisi PP No. 15 Tahun 2004 tentang Perum Perumnas, (vii) Penyiapan masukan formulasi kebijakan Hak Tanggungan dalam rangka sekuritisasi KPR terkait dengan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, (viii) Revisi Keppres No. 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, (ix) Revisi Keppres No. 63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N), (x) Revisi Keppres No. 14 Tahun 1993 jo. Keppres No. 46 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS), serta (xi) Pengembangan NSPK dalam rangka penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat;

2. Terlaksana penataan dan pengelolaan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
3. Terlaksana fasilitasi PSU kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 700.000 unit;
4. Terlaksana penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh seluas 655 Ha dengan jumlah penduduk terfasilitasi sebanyak 130.000 jiwa;
5. Terlaksana pembangunan rumah susun sewa (rusun sewa) sebanyak 36.480 unit.
6. Terlaksana pembangunan Rumah Khusus sebanyak 5.000 unit termasuk rumah umum sewa dan rumah pasca bencana;
7. Terlaksana fasilitasi perumahan swadaya berupa pembangunan baru sebanyak 50.000 unit;
8. Terlaksana fasilitasi perumahan swadaya berupa peningkatan kualitas sebanyak 50.000 unit;
9. Terlaksana fasilitasi penyediaan PSU perumahan swadaya berupa bantuan stimulan PSU swadaya sebanyak 50.000 unit;
10. Terlaksana fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi lahan dan bangunan rumah bagi MBR sebanyak 30.000 unit;
11. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan lokal;
12. Terlaksana penyaluran bantuan pembiayaan perumahan sebanyak 1.350.000 unit;
13. Meningkatnya mobilisasi dan pemanfaatan sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
14. Terselenggara fungsi pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman di tingkat pusat dan daerah (33 Provinsi);
15. Terlaksana DAK bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa fasilitasi PSU kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 320.000 unit;
16. Terlaksana kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
17. Terselenggara tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat secara efektif dan efisien.

BAB III **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, maka pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada:

1. Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien;
2. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan
3. Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Sebagai penjabaran dari RPJPN tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014 menugaskan Kementerian Perumahan Rakyat untuk melaksanakan program dan kegiatan yang termasuk dalam prioritas Bidang Sarana dan Prasarana, sub bidang Perumahan dan Permukiman. Prioritas Nasional untuk sektor perumahan rakyat adalah Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Tower Rusunami dan 650 *TwinBlock* Rusunawa berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012.

Sasaran umum yang akan dicapai dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatnya akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau, dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai, serta memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim (*secure tenure*) untuk mendukung pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs). Sasaran lain yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman di tingkat pusat dan daerah. Sedangkan, sasaran khusus untuk sektor perumahan adalah tersedianya akses bagi masyarakat terhadap perumahan baik perumahan baru maupun peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman serta kepastian hukum bagi 5,6 juta rumah tangga.

Untuk mewujudkan prioritas dan sasaran bidang perumahan dan permukiman, maka arah kebijakan pembangunan perumahan tahun 2010–2014 yang terkait dengan Kementerian Perumahan Rakyat adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, dengan:

1. Meningkatkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui (a) pembangunan 650 *Twin Block* rusunawa; (b) pembangunan 685.000 unit Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi; (c) fasilitasi pembangunan 180 *tower* rusunami melalui peran swasta; (d) penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pengembangan kawasan perumahan antara lain untuk mendukung pengembangan kota baru (*New Town Development*); (e) fasilitasi pembangunan baru/peningkatan kualitas perumahan swadaya serta

penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya; (f) pembangunan rumah khusus termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana; (g) fasilitasi penyediaan lahan; (h) pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal, teknologi dan penelitian di bidang perumahan dan permukiman;

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui: (a) penyediaan subsidi perumahan; (b) pengembangan fasilitasi likuiditas; (c) peningkatan mobilisasi sumber-sumber dana jangka panjang; dan (d) pengembangan tabungan perumahan nasional;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
4. Meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim (*secure tenure*) melalui fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; serta standardisasi perijinan dalam membangun rumah;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman melalui (a) pengembangan regulasi dan kebijakan; (b) pemberdayaan dan kemitraan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman; (c) peningkatan kapasitas dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman; (d) pengembangan pengelolaan aset (*property management*); (e) serta fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan permukiman daerah;
6. Memantapkan pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan yang didukung oleh sumber pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan melalui pengembangan informasi dan standardisasi KPR; serta pengembangan peraturan perundangan pendukungnya.

Strategi pendanaan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran bidang sarana dan prasarana, selain mengandalkan sumber pendanaan dari APBN juga mendorong sharing pembiayaan dari sumber-sumber lainnya yaitu dari:

1. Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD;
2. Swasta, baik melalui pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (*Public-Private Partnership*);
3. Luar negeri melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri/PHLN.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka melaksanakan penugasan dari RPJM Nasional, maka untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perumahan Rakyat maka disusun arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan Rakyat sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (RLH) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, melalui;

- a. Pembangunan rumah layak huni melalui pasar formal maupun secara swadaya masyarakat baik untuk pembangunan baru maupun peningkatan kualitas;
 - b. Pembangunan rumah susun (rusun) baik sewa maupun milik;
 - c. Penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang memadai untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman serta PSU perumahan swadaya;
 - d. Penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
 - e. Pembangunan rumah khusus, termasuk rumah umum sewa dan pasca bencana;
 - f. Pengembangan kawasan khusus, termasuk kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan pasca bencana;
 - g. Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi tanah bagi MBR.
3. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman bagi MBM melalui;
 - a. Pemberian kemudahan dan pengembangan bantuan pembiayaan perumahan melalui dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);
 - b. Peningkatan penggerakan dan pemupukan dana, baik dana masyarakat, dana tabungan perumahan maupun dana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
 4. Peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan lokal;
 5. Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Strategi Kementerian Perumahan Rakyat untuk memastikan tercapainya sasaran-sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2010–2014 adalah sebagai berikut:

1. Mengefektifkan kewenangan perumusan kebijakan dan regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui pengembangan dan penyediaan produk-produk pengaturan yang memadai;
2. Memantapkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan kelembagaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terintegrasi;
3. Mengefektifkan kewenangan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung penyediaan perumahan dan kawasan permukiman khususnya sebagai proyek-proyek percontohan dan *best practice* di berbagai lokasi terpilih yang dapat direplikasi dan dikembangkan secara lebih luas;
4. Mengoptimalkan peran dan kapasitas para pemangku kepentingan, khususnya peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui bimbingan/bantuan teknis, pendampingan dan penyebaran informasi dan kebijakan nasional pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

5. Memanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya perumahan dan kawasan permukiman, hasil penelitian dan pengembangan teknologi, serta kearifan lokal untuk mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman yang akuntabel dan berkelanjutan;
7. Memanfaatkan peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Pendanaan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya mengandalkan anggaran Kementerian Perumahan Rakyat yang bersumber dari APBN, tetapi juga membutuhkan dukungan *sharing* pembiayaan dari para pemangku kepentingan lainnya, antara lain:

1. Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, antara lain untuk;
 - a. Melaksanakan SPM bidang Perumahan Rakyat;
 - b. Penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya;
 - d. Dana pendamping untuk pelaksanaan Hibah Daerah.
2. Masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya;
3. Bank dan LKNB yang berpartisipasi dalam penyaluran pembiayaan perumahan yang berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yaitu dalam penyediaan sebagian pokok pinjaman;
4. Pengembang yang berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan rumah tapak dan rumah susun milik (rusun milik);
5. Perusahaan swasta lainnya, yaitu melalui pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (*Public-Private Partnership*) antara lain untuk;
 - a. Fasilitasi dan stimulasi (bantuan sosial) pembangunan perumahan swadaya;
 - b. Penyediaan perumahan bagi pekerja.
6. Luar negeri melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri/PHLN untuk membiayai proyek-proyek pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang strategis.

Sehubungan dengan implementasi Otonomi Daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka mekanisme pendanaan dalam rangka mendorong sinergi Pusat dan Daerah dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman akan ditingkatkan, yaitu melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi dan Hibah Daerah.

Di samping itu, pemerintah juga memberikan subsidi yang merupakan kewajiban pemerintah (PSO) kepada penyedia jasa di bidang perumahan untuk mencapai standar pelayanan minimum tertentu yang akan dicapai. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesinambungan pelayanan perumahan dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pembangunan perumahan di atas, Kementerian Perumahan Rakyat menyusun program-program sebagai berikut:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lain Kementerian Perumahan Rakyat**
2. **Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**
3. **Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Program-program tersebut dapat dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan pokok dengan unit kerja pelaksana sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini.

TABEL 1
STRUKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN UNIT KERJA
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010–2014

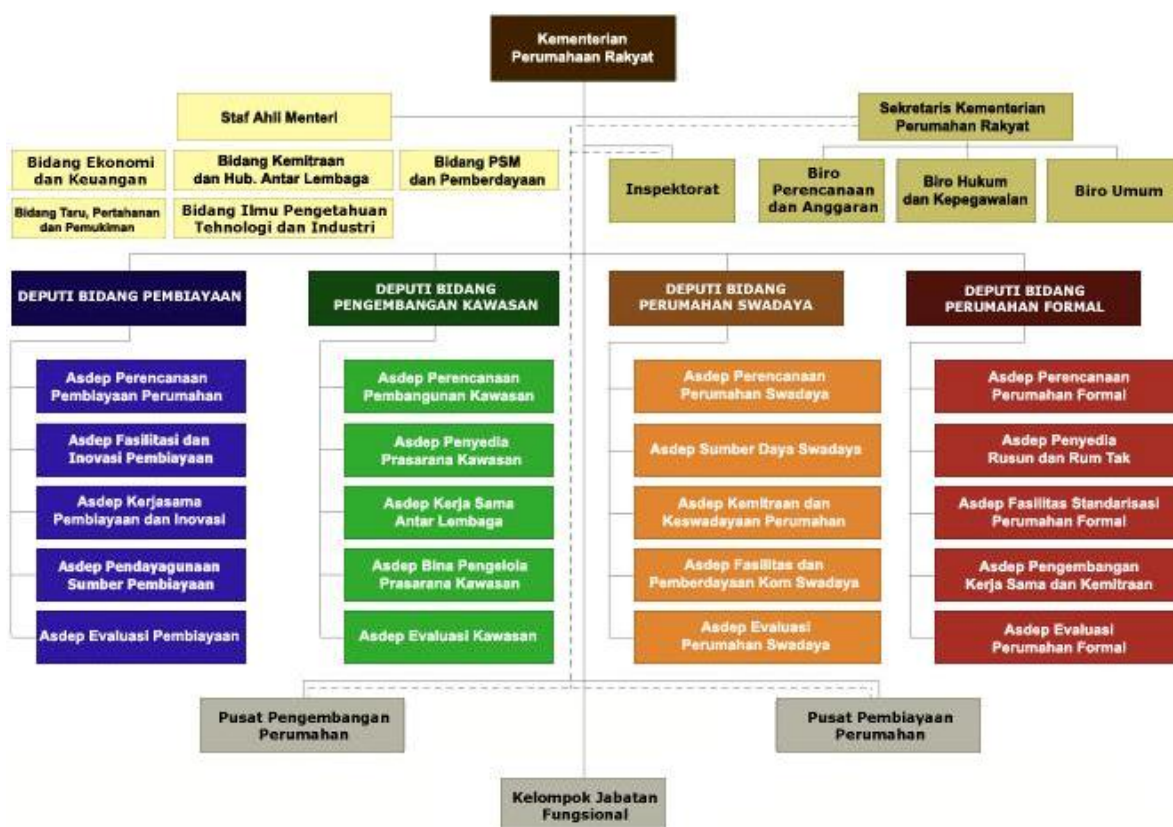
NO	PROGRAM/KEGIATAN	UNIT KERJA
A	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	
I	SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Biro Perencanaan dan Anggaran
2	Peningkatan Produk Hukum dan Kepegawaian	Biro Hukum dan Kepegawaian
3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Biro Umum
4	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perumahan Rakyat	Inspektorat
5	Dukungan Pengembangan Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman	Staf Ahli Menteri
B	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
II	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN	
1	Perencanaan, Pemrograman dan Anggaran, Pendataan serta Sosialisasi Pengembangan Kawasan	Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan
2	Fasilitasi Penyediaan Prasarana Kawasan	Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan
3	Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga	Asisten Deputi Kerjasama Antar Lembaga
4	Pembinaan Pengelolaan Prasarana Kawasan	Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan
5	Pemantauan, Evaluasi, Pengkajian, Analisis dan Pelaporan Kinerja bidang Pengembangan Kawasan	Asisten Deputi Evaluasi Kawasan
III	DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA	
6	Perencanaan, Penganggaran, Pendataan dan Sosialisasi Kebijakan Perumahan Swadaya	Asisten Deputi Perencanaan Perumahan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	UNIT KERJA
		Swadaya
7	Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya Perumahan Swadaya	Asisten Deputy Sumber Daya Swadaya
8	Fasilitasi Pra-sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi	
9	Kemitraan dan Keswadayaan dalam Penyelenggaraan Perumahan Swadaya	Asisten Deputy Kemitraan Dan Keswadayaan Perumahan
10	Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya	Asisten Deputy Fasilitas dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya
11	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan Swadaya	Asisten Deputy Evaluasi Perumahan Swadaya
IV	DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL	
12	Perencanaan Perumahan Formal	Asisten Deputy Perencanaan Perumahan Formal
13	Dukungan Penyediaan Perumahan Formal	Asisten Deputy Penyediaan Rumah Susun Dan Rumah Tapak
14	Standardisasi Perumahan Formal	Asisten Deputy Fasilitas Standardisasi Perumahan Formal
15	Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Kerjasama-Kemitraan Perumahan Formal	Asisten Deputy Pengembangan Kerjasama Dan Kemitraan
16	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan Formal	Asisten Deputy Evaluasi Perumahan Formal
V	PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
17	Fasilitasi pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman	Pusat Pengembangan Perumahan
18	Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh	
19	Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya	
20	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya	
21	Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	
22	Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusun Sewa)	
23	Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus	
24	Dukungan Pelaksanaan Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
C	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
VI	DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN	
1	Perencanaan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	Asisten Deputy Perencanaan Pembiayaan Perumahan
2	Pengembangan fasilitas dan inovasi pembiavaan	Asisten Deputy Fasilitas

NO	PROGRAM/KEGIATAN	UNIT KERJA
	perumahan dan kawasan permukiman	Dan Inovasi Pembiayaan
3	Fasilitasi pembayaran dan penyelesaian Subsidi Perumahan Tahun 2008 – 2010	
4	Pengembangan Kerjasama Pembiayaan dan Investasi Perumahan dan kawasan permukiman	Asisten Deputi Kerjasama Pembiayaan Dan Investasi
5	Pengelolaan dan pendayagunaan Sumber-sumber Pembiayaan Perumahan dan kawasan permukiman	Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan
6	Evaluasi, pelaporan dan pengkajian pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan
VII	BLU-PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN	
7	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	BLU-PPP

Struktur Organisasi Kementerian Perumahan Rakyat tersebut dapat dilihat pada Bagan 1 berikut ini.

BAGAN I STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT



3.4. KEBUTUHAN PENDANAAN

Untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2010–2014 bidang perumahan dan permukiman serta sasaran strategis

Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010–2014, maka kebutuhan pendanaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat sebagaimana terlihat pada Tabel 2 berikut ini.

TABEL 2
KEBUTUHAN INVESTASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2010–2014

Rp Juta

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Kebutuhan Pendanaan		Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Swasta dan Masyarakat
			Sasaran	Biaya			
1	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman			2.371.349	2.371.349	-	-
2	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni			161.762.302	31.662.302	500.000	129.600.000
a	Rumah Tapak *)	Unit	1.200.000	108.000.000	18.017.821	-	108.000.000
b	Rumah Susun Sewa	TB	380	5.060.000	4.560.000	500.000	-
c	Rumah Susun Milik *)	Unit	150.000	21.600.000	3.794.349	-	21.600.000
d	Rumah Khusus	Unit	5.000	290.132	290.132	-	-
e	PSO Perumahan dan Kawasan Permukiman			5.000.000	5.000.000		
3	Pembangunan Perumahan Swadaya			5.500.000	812.750	-	4.687.250
a	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya	Unit	50.000	4.500.000	544.250	-	3.955.750
b	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	Unit	50.000	1.000.000	268.500	-	731.500
4	Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh			1.251.600	1.043.000	208.600	-
	Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Ha	655	1.251.600	1.043.000	208.600	-
5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas			4.617.250	4.617.250	-	-
a	PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman	Unit	700.000	4.375.000	4.375.000	-	-
b	PSU Swadaya	Unit	50.000	236.250	242.250	-	-
	Grand Total			175.502.501	40.506.651	708.600	134.287.250

*) Intervensi Pemerintah Pusat berupa FLPPRumah Sejahtera Tapak dan Rumah Sejahtera Susun Milik tidak dihitung sebagai investasi

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010–2014 merupakan arahan dasar yang dijabarkan secara operasional oleh masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat sehingga sasaran kegiatan yang ingin dicapai nantinya dapat memenuhi misi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah baru layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai serta meningkatnya kepastian hukum dalam bermukim, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, serta penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan secara optimal sehingga pada akhirnya pemenuhan hunian yang layak sebagai hak dasar rakyat dapat lebih terjamin guna mewujudkan masyarakat yang lebih berjiwa, mandiri dan produktif.

Dengan demikian, Rencana Strategis ini tidak bersifat kaku dan selalu terbuka untuk disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional sebagai suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap lingkungan strategis yang senantiasa berubah.

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 - 2014
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Program/ Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kegiatan	Satuan	Target						Unit Kerja	Keterangan
					2010	2011	2012	2013	2014	Total		
I	ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (BA 091)											
A.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat											
		Terselenggara dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Perumahan Rakyat	a. Jumlah produk pengaturan yang dihasilkan.	dokumen	5	6	5	5	5	26	Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat	
			b. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.	dokumen	16	17	19	18	20	90		
			c. Jumlah SDM Kemenpera mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM.	orang	290	290	310	340	380	1.610		
			d. Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan Barang Milik Negara.	laporan	3	3	3	3	3	15		
			e. Jumlah penyelenggaraan kegiatan keterbukaan informasi publik.	laporan	5	5	5	5	5	25		
1.	Perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan dan permukiman	Tersusun Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perumahan dan Permukiman	a. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman	dokumen	6	5	9	7	6	33	Biro Perencanaan dan Anggaran	
			b. Jumlah laporan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman	laporan	15	19	20	21	19	94		
			c. Jumlah dokumen pendataan dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	dokumen	10	12	10	11	14	57		
			d. Jumlah laporan pengelolaan sistem jaringan dan informasi perumahan dan kawasan permukiman	laporan	4	7	7	7	7	32		
2.	Peningkatan Produk Hukum dan Kepegawaian	Meningkatnya Produk Hukum dan Kepegawaian di Bidang Perumahan dan Permukiman	a. Jumlah produk pengaturan yang dihasilkan	dokumen	5	6	5	5	5	26	Biro Hukum dan Kepegawaian	*) Mulai tahun 2011, Bagian Humas dan Protokol dipindahkan dari Biro Hukum dan Kepegawaian
			b. Jumlah koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan	laporan	6	4	2	2	2	16		
			c. Jumlah monev penyusunan peraturan perundang-undangan	laporan	1	1	1	1	1	5		
			d. Jumlah fasilitasi kerjasama kelembagaan	dokumen	4	4	4	4	3	19		
			e. Jumlah fasilitasi pelayanan bantuan hukum	laporan	3	3	3	3	4	16		
			f. Jumlah kegiatan pengembangan aparatur Kementerian Perumahan Rakyat	laporan	5	5	5	5	5	25		
			g. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Kementerian Perumahan Rakyat	laporan	2	2	2	2	2	10		

No	Program/ Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kegiatan	Satuan	Target						Unit Kerja	Keterangan
					2010	2011	2012	2013	2014	Total		
3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	a. Layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	Laporan	1	1	1	1	1	5	Biro Umum	*) Mulai tahun 2011, Bagian Humas dan Protokol dipindahkan dari Biro Hukum dan Kepegawaian
			b. Layanan perkantoran	Laporan	11	11	11	11	11	55		
			c. Laporan kegiatan/pembinaan administrasi, keuangan dan Barang Milik Negara	Laporan	20	16	16	16	16	84		
			d. Laporan penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan	Laporan	9	8	9	9	9	44		
			e. Layanan operasional Menteri	Laporan	1	1	1	1	1	5		
4	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perumahan Rakyat	Terselenggara pembinaan dan pengawasan akuntabilitas Aparatur Kementerian Perumahan Rakyat	a. Tersusunnya rumusan kebijakan pengawasan intern	Dokumen	-	-	4	4	4	12	Inspektorat Kemenpera	
			b. Pengawasan akuntabilitas kinerja	Laporan	15	14	17	19	22	87		
			c. Kegiatan pembinaan	Laporan	4	7	9	9	9	38		
5	Dukungan pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Terselenggara telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	a. Laporan telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di bidang Ekonomi dan Keuangan	laporan	2	2	2	2	2	10	Staf Ahli	
			b. Laporan telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pemukiman	laporan	2	2	2	2	2	10		
			c. Laporan telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di bidang Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan	laporan	2	2	2	2	2	10		
			d. Laporan telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di bidang Iptek dan Industri	laporan	2	2	2	2	2	10		
			e. Laporan telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di bidang Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10		
B. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman												
B.1.		Terwujudnya lingkungan hunian yang layak sebanyak 1.020.000 unit dan berkurangnya lingkungan permukiman kumuh seluas 655 ha melalui penyediaan PSU kawasan perumahan dan kawasan permukiman	a. Jumlah Rancangan Peraturan di Bidang Pengembangan Kawasan	Dokumen		1	2	3	4	10	Deputi Bidang Pengembangan Kawasan	
			b. Jumlah unit rumah umum yang akan terlayani melalui penyediaan PSU Kawasan	Unit Rumah	10.374	117.010	168.548	187.862	216.206	700.000		
			c. Jumlah unit rumah umum yang akan terlayani melalui program DAK bidang Perumahan dan Permukiman	Unit Rumah	-	24.000	90.000	90.000	116.000	320.000		
			d. Luas lingkungan permukiman kumuh berkurang	Hektar	50	100	150	175	180	655		
1	Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran, Pendataan serta Sosialisasi pengembangan	Tersusun perencanaan strategis, pemrograman, penganggaran, pengelolaan data dan sosialisasi kebijakan Pengembangan Kawasan	a. Jumlah dokumen perencanaan, strategi dan kebijakan	Dokumen	2	2	38	74	112	228	Asdep Perencanaan Pengembangan Kawasan	
			b. Jumlah Dokumen Program dan Rencana Kerja serta Anggaran Pengembangan Kawasan	Dokumen	3	2	2	2	3	12		
			c. Jumlah Dokumen Data dan Informasi serta Sosialisasi pengembangan kawasan	Dokumen	3	5	5	5	5	23		
2	Fasilitasi Penyediaan Prasarana Kawasan	Terfasilitasi data dan penyediaan lahan serta perencanaan prasarana kawasan	a. Jumlah dokumen data potensi lahan dan prasarana kawasan	Dokumen	1	2	3	4	5	15	Asdep Penyediaan Prasarana	

No	Program/ Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kegiatan	Satuan	Target						Unit Kerja	Keterangan
					2010	2011	2012	2013	2014	Total		
		yang dapat mendorong pembangunan rumah umum	b. Jumlah dokumen perencanaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan	Dokumen	4	5	6	7	8	30	Kawasan	
			c. Jumlah dokumen terkait penyediaan lahan untuk mendukung pembangunan rumah umum	Dokumen	4	5	6	7	8	30		
			d. Jumlah dokumen terkait fasilitasi pembangunan Prasarana yang dapat mendorong pembangunan rumah umum	Dokumen	4	5	6	7	8	30		
3	Fasilitasi kerjasama antar lembaga	Terfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antara para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah	a. Jumlah dokumen kerjasama Pemerintah dan Swasta	Dokumen	3	3	3	3	3	15	Asdep Kerjasama Antar Lembaga	
			b. Jumlah dokumen kerjasama Pemerintah Pusat- Daerah dan Antar Daerah	Dokumen	3	3	3	3	3	15		
			c. Jumlah dokumen kerjasama Swasta dan Masyarakat	Dokumen	3	3	3	3	3	15		
4	Pembinaan Pengelolaan Prasarana Kawasan	Terfasilitasi pembinaan, pengelolaan prasarana, peningkatan kapasitas pemasaran dan pelayanan konsumen Rumah Susun dan Rumah Tapak	a. Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Prasarana Rumah Susun dan Rumah Tapak	Dokumen	1	3	5	5	4	18	Asdep Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan	
			b. Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas	Dokumen	1	5	4	4	4	18		
			c. Jumlah Dokumen Pembinaan Pemasaran dan Pelayanan Konsumen	Dokumen	1	1	5	5	6	18		
5	Pemantauan, evaluasi, pengkajian, analisis dan pelaporan kinerja bidang pengembangan kawasan	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja pengembangan kebijakan dan laporan periodik di bidang pengembangan kawasan	a. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Bidang Pengembangan Kawasan	Dokumen	3	5	4	4	4	20	Asdep Evaluasi Kawasan	
			b. Jumlah Dokumen Pengembangan Kebijakan dan Pengkajian di bidang Pengembangan Kawasan	Dokumen	2	4	4	4	4	18		
			c. Jumlah Laporan Kinerja Periodik Deputi Bidang Pengembangan Kawasan	Laporan	2	4	4	4	4	18		
B.2.		Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk membangun rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 130.000 MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi	a. Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perumahan swadaya	NSPK	-	2	-	2	2	6	Deputi Bidang Perumahan Swadaya	
			b. Jumlah laporan MBR yang terfasilitasi	Laporan	-	5	5	5	5	20		
			c. Jumlah kerjasama/kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan Swadaya.	Dokumen	-	1	3	6	9	19		
			d. Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi kinerja serta hasil kajian sebagai bahan masukan strategis bagi kebijakan pembangunan perumahan swadaya	Laporan	-	1	3	3	3	10		
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Pendataan dan Sosialisasi Kebijakan Perumahan Swadaya	Tersusunnya perencanaan strategis, program dan penganggaran, pengelolaan data serta sosialisasi kebijakan perumahan swadaya	a. Jumlah dokumen perencanaan, strategi dan regulasi bidang perumahan swadaya	Dokumen	1	4	6	6	8	25	Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya	
			b. Jumlah dokumen program dan Penganggaran bidang perumahan swadaya	Dokumen	2	5	5	5	6	23		
			c. Jumlah laporan pendataan dan sosialisasi perumahan swadaya.	Laporan	2	6	6	6	6	26		

No	Program/ Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kegiatan	Satuan	Target						Unit Kerja	Keterangan
					2010	2011	2012	2013	2014	Total		
2.	Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya Perumahan Swadaya	Meningkatnya akses masyarakat/komunitas terhadap sumber daya perumahan dan permukiman	a. Jumlah masukan teknis pelaksanaan kebijakan dan NSPK yang terkait peningkatan akses serta pemanfaatan sumberdaya perumahan swadaya	Dokumen	5	2	2	2	2	13	Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya	
			b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta kegiatan penunjang lainnya terkait peningkatan akses dan pemanfaatan sumberdaya perumahan swadaya	Laporan	5	8	4	4	4	25		
			c. Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan PSU Perumahan Swadaya	Unit	10.000	12.500	16.250	7.500	3.750	50.000		
3.	Fasilitasi Pra-sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi	Terlaksana Fasilitasi Pra-sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi Perumahan Swadaya	a. Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi pra sertifikasi	Bidang	-	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000		
			b. Jumlah Pendampingan pasca sertifikasi	Laporan	-	5	5	5	5	20		
4.	Kegiatan Kemitraan dan Keswadayaan dalam Penyelenggaraan Perumahan Swadaya	Tersusunnya rumusan kebijakan, terlaksananya kemitraan, dan meningkatnya keswadayaan dalam penyelenggaraan perumahan	a. Jumlah masukan teknis perumusan kebijakan kemitraan dan keswadayaan perumahan	Dokumen	2	1	3	3	3	12	Asisten Deputi Kemitraan Dan Keswadayaan Perumahan	
			b. Jumlah forum kemitraan perumahan swadaya	Laporan	-	-	3	3	3	9		
			c. Jumlah dokumen kerja sama	Dokumen	-	1	3	6	9	19		
			d. Jumlah pelaksanaan kegiatan kebijakan keswadayaan perumahan	Laporan	8	10	3	6	9	36		
5.	Peningkatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat untuk menempati rumah layak huni dalam lingkungan yang aman dan sehat yang dapat menstimulasi MBR.	a. Jumlah masukan teknis rumusan kebijakan, regulasi dan NSPK terkait peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Perumahan swadaya	Dokumen	3	3	6	6	6	24	Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya	
			b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta kegiatan penunjang lainnya terkait peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan Swadaya	Laporan	6	8	3	3	3	23		
			c. Jumlah laporan Wasdal peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan Swadaya	Laporan	-	-	3	3	3	9		
			d. Jumlah Fasilitasi dan Simulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya	Unit	2.000	12.500	16.250	10.500	8.750	50.000		
			e. Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Unit	20.000	12.500	16.250	750	500	50.000		
6.	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan Swadaya	Tersusunnya evaluasi kinerja, pengembangan kebijakan dan laporan periodik bidang perumahan swadaya	a. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja bidang perumahan swadaya	Laporan	1	4	4	4	4	17	Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya	
			b. Jumlah kajian pelaksanaan kebijakan perumahan swadaya	Dokumen	6	5	3	3	3	20		
			c. Jumlah laporan periodik Deputi Bidang Perumahan Swadaya	Laporan	2	1	3	3	3	12		

No	Program/ Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kegiatan	Satuan	Target						Unit Kerja	Keterangan
					2010	2011	2012	2013	2014	Total		
B.3		Terwujudnya Penyelenggaraan Perumahan Formal melalui pembangunan 380 TB Rumah Susun Sewa dan 5000 unit Rumah Khusus	a. Tersusunnya rancangan peraturan di bidang perumahan formal	Peraturan	1	2	2	2	2	9	Deputi Bidang Perumahan Formal	
			b. Memastikan Terbangunnya Rumah Susun Sewa (Rusunawa)	TB	49*)		100	180	51	380		
			c. Memastikan Terbangunnya Rumah Khusus	Unit	1.000	750	1.050	1.350	850	5.000		
1.	Perencanaan Perumahan Formal	Tersusunnya perencanaan dan strategi, program dan penganggaran, pengelolaan data serta sosialisasi kebijakan perumahan formal	a. Jumlah Laporan Perencanaan dan Strategi Perumahan Formal	Laporan	3	4	6	6	6	25	Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Formal	
			b. Jumlah Laporan Program dan Penganggaran Perumahan Formal	Laporan	3	3	4	4	4	18		
			c. Jumlah Laporan Pendataan dan Sosialisasi Perumahan Formal	Laporan	4	3	3	3	3	16		
2.	Dukungan Penyediaan Perumahan Formal	Terlaksananya fasilitasi penyediaan perumahan formal	a. Jumlah Laporan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Laporan	4	5	4	4	4	21	Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun Dan Rumah Tapak	
			b. Jumlah Laporan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Laporan	4	4	6	6	6	26		
			c. Jumlah Laporan Fasilitasi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Laporan	3	3	2	2	2	12		
3.	Standardisasi Perumahan Formal	Terlaksananya fasilitasi standardisasi perumahan formal	a. Jumlah Laporan Fasilitasi standardisasi Rumah	Laporan	4	3	4	4	4	19	Asisten Deputi Fasilitas Standardisasi Perumahan	
			b. Jumlah Laporan Fasilitasi Standardisasi Rumah	Laporan	4	3	4	4	4	19		
			c. Jumlah Laporan Fasilitasi Standardisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas	Laporan	1	4	4	4	4	17		
4.	Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Kerjasama-Kemitraan Perumahan Formal	Terlaksananya fasilitasi kerjasama dan kemitraan perumahan formal	a. Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan Pemerintah	Laporan	4	4	5	5	5	23	Asisten Deputi Pengembangan Kerjasama Dan Kemitraan	
			b. Jumlah Laporan Fasilitasi Kemitraan Badan Usaha	Laporan	3	4	4	4	4	19		
			c. Jumlah Laporan Fasilitasi Kemitraan Badan Nirlaba	Laporan	3	2	3	3	3	14		
5.	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan Formal	Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan perumahan formal	a. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Formal	Laporan	4	2	3	3	3	15	Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal	
			b. Jumlah Laporan Pengkajian Perumahan Formal	Laporan	4	6	6	6	6	28		
			c. Jumlah Laporan Analisa dan Pelaporan Perumahan Formal	Laporan	2	2	3	3	3	13		
B.4.		Terlaksana operasionalisasi kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Realisasi operasionalisasi kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pusat Pengembangan Perumahan	
1	Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman	Terlaksana fasilitasi pembangunan PSU pengembangan kawasan perumahan dan permukiman	Jumlah unit rumah umum yang terbangun melalui penyediaan PSU Kawasan	Unit	10.374	117.010	145.000	201.616	226.000	700.000		
2	Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh	Terlaksana fasilitasi penataan lingkungan permukiman kumuh	Luas lingkungan permukiman kumuh menjadi berkurang	Hektar	50	100	150	175	180	655		
3.	Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya	Terlaksananya Pembangunan PSU Perumahan Swadaya	Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan PSU Perumahan Swadaya	Unit	10.000	12.500	16.250	7.500	3.750	50.000		
4.	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya	Terlaksananya Pembangunan Baru Perumahan Swadaya	Jumlah Fasilitas dan Simulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya	Unit	2.000	12.500	16.250	10.500	8.750	50.000		

No	Program/ Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kegiatan	Satuan	Target						Unit Kerja	Keterangan
					2010	2011	2012	2013	2014	Total		
5.	Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Unit	20.000	12.500	16.250	750	500	50.000		*) Merupakan usulan kegiatan baru untuk mendukung pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan di unit Pusat Pengembangan Perumahan, alokasinya diambil dari pengembangan kebijakan Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
6.	Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa)	Terlaksananya Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa)	Jumlah Rusunawa Terbangun	TB	49	100	180	51	-	380		
7.	Fasilitasi Pembangunan Rumah	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus Terbangun	Unit	1.000	750	1.050	1.350	850	5.000		
8.	Dukungan pelaksanaan operasionalisasi kebijakan pembangunan perumahan dan	Terselenggaranya dukungan pelaksanaan operasionalisasi kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Layanan perkantoran	Laporan	4	4	4	4	4	20		
C.	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan kawasan permukiman											
		Meningkatnya jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menghuni rumah layak dan terjangkau yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan.	a. Jumlah KPR Sejahtera yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan.	Unit	210.000	250.000	290.000	300.000	300.000	1.350.000	Deputi Bidang Pembiayaan	
			b. Tersusunnya rancangan peraturan perundangan di bidang Pembiayaan Perumahan.	Dokumen	1	2	2	2	2	9		
			c. Tingkat bunga/margin kredit/ pembiayaan pemilikan rumah Sejahtera yang meningkatkan keterjangkauan MBR.	Tingkat suku bunga KPR Sejahtera	<10 %	<10 %	<10 %	<10 %	<10 %	<10%		
			d. Jumlah LKB dan LKNB yang berpartisipasi dalam bantuan pembiayaan perumahan.	LKB dan LKNB yang melakukan kerjasama dengan Kemenpera untuk menyalurkan bantuan ELDP	3	9	12	16	21	21		
1	Perencanaan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	Tersedianya rumusan kebijakan, program, dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	a. Jumlah dokumen masukan teknis, rumusan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	7	5	9	9	9	39	Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan	
			b. Jumlah koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi rumusan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	Laporan	4	6	9	9	9	37		
			c. Jumlah pemantauan, analisis dan evaluasi rumusan kebijakan, program, dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	Laporan	1	2	4	4	4	15		
2	Pengembangan fasilitasi dan inovasi pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	Tersedianya skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	a. Jumlah dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan pengembangan skim dan mekanisme pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	Dokumen	6	6	6	6	6	30	Asisten Deputi Fasilitasi Dan Inovasi Pembiayaan	
			b. Jumlah koordinasi dan fasilitasi penyiapan rumusan pengembangan skim dan mekanisme pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	Laporan	1	3	6	6	6	22		

No	Program/ Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kegiatan	Satuan	Target						Unit Kerja	Keterangan
					2010	2011	2012	2013	2014	Total		
			c. Jumlah pemantuan, analisis dan evaluasi pelaksanaan skim dan mekanisme pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	Laporan	1	1	4	4	4	14		
3	Pengembangan Kerjasama Pembiayaan dan Investasi Perumahan dan kawasan permukiman	Terwujudnya kerjasama pembiayaan dan investasi perumahan dan kawasan permukiman.	a. Jumlah dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan pengembangan kerjasama pembiayaan dan investasi perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	3	4	6	6	6	25	Asisten Deputi Kerjasama Pembiayaan Dan Investasi	
			b. Jumlah koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembiayaan dan investasi perumahan dan kawasan permukiman.	Laporan	7	5	6	6	6	30		
			c. Jumlah pemantuan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembiayaan dan investasi perumahan dan kawasan permukiman	Laporan	3	1	4	4	4	16		
4	Pengerahan dan pendayagunaan Sumber-sumber Pembiayaan Perumahan dan kawasan permukiman	Terselenggaranya pengerahan dan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	a. Jumlah dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan pengerahan dan pendayagunaan sumber – sumber pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	5	6	6	6	6	29	Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan	
			b. Jumlah koordinasi dan fasilitasi pengerahan dan pendayagunaan sumber – sumber pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	Laporan	4	3	6	6	6	25		
			c. Jumlah pemantuan, analisis, dan evaluasi pengerahan dan pendayagunaan sumber – sumber pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	Laporan	2	2	4	4	4	16		
5	Evaluasi, pelaporan dan pengkajian pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	Tersedianya rumusan kebijakan evaluasi dan pelaporan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	a. Jumlah dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan evaluasi pembiayaan	Dokumen	7	3	4	4	4	22	Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan	
			b. Jumlah koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	Laporan	-	5	4	4	4	17		
			c. Jumlah analisis dan laporan hasil pelaksanaan kebijakan dan program pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	Laporan	-	80	80	80	80	320		

No	Program/ Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kegiatan	Satuan	Target						Unit Kerja	Keterangan
					2010	2011	2012	2013	2014	Total		
II	ANGGARAN SUBSIDI (BA 999)											
A	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan kawasan permukiman											
1	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Terlaksana penyaluran pembiayaan perumahan	Jumlah pembiayaan perumahan	Unit	210.000	250.000	290.000	300.000	300.000	1.350.000	BLU-PPP	
-	KPR Rumah Sejahtera Tapak	Terlaksana penyaluran pembiayaan KPR Rumah Sejahtera Tapak	Jumlah pembiayaan KPR Rumah Sejahtera Tapak	Unit	150.000	180.000	210.000	210.000	200.000	950.000		
-	KPR Satuan Rumah Sejahtera Susun Milik	Terlaksana penyaluran pembiayaan KPR Satuan Rumah Sejahtera Susun Milik	Jumlah pembiayaan KPR Satuan Rumah Sejahtera Susun Milik	Unit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000		
-	KPR/KPRS Mikro	Terlaksana penyaluran pembiayaan KPRS/KPRS Mikro	Jumlah pembiayaan KPRS/KPRS Mikro	Unit	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	250.000		
2	Fasilitasi Pembayaran dan penyelesaian Subsidi Tahun 2008 – 2010	Terlaksana pembayaran dan penyelesaian subsidi Tahun 2008 - 2010	Jumlah pembayaran dan penyelesaian subsidi tahun 2008 - 2010		277.025	267.777	-	-	-	544.802	Asisten Deputi Fasilitasi Dan Inovasi Pembiayaan	
III	DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN											
	Dak Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksana DAK perumahan dan kawasan permukiman berupa fasilitasi dan stimulasi pembangunan PSU Kawasan perumahan dan permukiman	Jumlah unit rumah umum yang akan terlayani melalui program DAK bidang Perumahan dan Permukiman	Unit Rumah	-	24.000	90.000	90.000	116.000	320.000	Pemerintah Kab./Kota penerima DAK	
IV	PSO BIDANG PERUMAHAN											
	Kewajiban pelayanan publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman	1. Terwujud benchmark biaya produksi rumah layak huni 2. Terwujud land banking untuk pembangunan rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni terbangun	Unit	-	-	25.000	25.000	30.000	80.000	BUMN yang Ditunjuk sebagai Pelaksana PSO Perumahan	

*) Mulai tahun 2011, Bagian Humas dan Protokol dipindahkan dari Biro Hukum dan Kepegawaian ke Biro Umum

**) Jumlah sasaran Bantuan Pembiayaan Perumahan sesuai dengan sasaran RPJMN.

c,d,g



6000

6,250240987
6,250011563



PENDANAAN TAHUN 2010 - 2014
 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kegiatan/Indikator	Anggaran						Unit Kerja
		2010	2011	2012	2013	2014	Total	
I	ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (BA 091)							
A.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat	179.106,33	213.800,00	223.409,41	271.569,79	306.511,46	1.194.396,99	Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat
1	Perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan dan permukiman	98.934,29	138.181,20	129.151,41	158.779,79	186.381,46	711.428,15	Biro Perencanaan dan Anggaran
	a. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan kawasan	4.400,00	2.950,00	6.000,00	5.050,00	5.350,00	23.750,00	
	b. Jumlah laporan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman	81.586,55	123.181,20	111.101,41	139.229,79	164.731,46	619.830,41	
	c. Jumlah dokumen pendataan dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8.600,00	7.130,00	7.130,00	8.950,00	10.750,00	42.560,00	
	d. Jumlah laporan pengelolaan sistem jaringan dan informasi perumahan dan kawasan	4.347,74	4.920,00	4.920,00	5.550,00	5.550,00	25.287,74	
2	Peningkatan Produk Hukum dan Kepegawaian	16.433,38	10.800,00	15.480,00	17.110,00	18.930,00	78.753,38	Biro Hukum dan Kepegawaian
	a. Jumlah produk pengaturan yang dihasilkan	5.933,38	1.616,00	3.150,00	3.400,00	3.750,00	17.849,38	
	b. Jumlah koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan	1.500,00	1.000,00	1.150,00	1.300,00	1.450,00	6.400,00	
	c. Jumlah movev penyusunan peraturan perundang-undangan	500,00	520,00	650,00	700,00	750,00	3.120,00	
	d. Jumlah fasilitasi kerjasama kelembagaan	1.800,00	1.264,00	2.280,00	2.560,00	2.830,00	10.734,00	
	e. Jumlah fasilitasi pelayanan bantuan hukum	500,00	1.200,00	1.700,00	1.950,00	2.250,00	7.600,00	
	f. Jumlah kegiatan pengembangan aparatur Kementerian Perumahan Rakyat	4.750,00	3.750,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	25.000,00	
	g. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Kementerian Perumahan Rakyat	1.450,00	1.450,00	1.550,00	1.700,00	1.900,00	8.050,00	
3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	55.881,66	56.318,80	69.300,00	84.580,00	90.000,00	356.080,46	Biro Umum
	a. Layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	25.500,00	27.118,81	31.500,00	36.500,00	40.500,00	161.118,81	
	b. Layanan perkantoran	12.086,13	15.423,63	15.500,00	19.800,00	20.000,00	82.809,76	
	c. Laporan kegiatan/pembinaan administrasi, keuangan dan Barang Milik Negara	9.095,53	6.208,37	9.700,00	14.000,00	15.100,00	54.103,90	
	d. Laporan penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan *)	9.200,00	7.568,00	10.800,00	11.880,00	12.000,00	51.448,00	
	e. Layanan operasional Menteri	-	-	1.800,00	2.400,00	2.400,00	6.600,00	
4	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perumahan Rakyat	2.857,00	3.500,00	4.478,00	5.100,00	5.200,00	21.135,00	Inspektorat Kemenpera
	a. Tersusunnya rumusan kebijakan pengawasan intern	-	-	671,70	1.000,00	1.000,00	2.671,70	
	b. Pengawasan akuntabilitas kinerja	1.753,00	2.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	12.453,00	
	c. Kegiatan pembinaan	1.104,00	1.500,00	1.006,30	1.200,00	1.200,00	6.010,30	

No	Kegiatan/Indikator	Anggaran						Unit Kerja
		2010	2011	2012	2013	2014	Total	
5	Dukungan pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	27.000,00	Staf Ahli
	a. Laporan telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di bidang Ekonomi dan Keuangan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	5.400,00	
	b. Laporan telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pemukiman	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	5.400,00	
	c. Laporan telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di bidang Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	5.400,00	
	d. Laporan telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di bidang Iptek dan Industri	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	5.400,00	
	e. Laporan telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di bidang Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	5.400,00	
B.	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	734.535,09	2.488.690,00	3.893.570,59	2.464.648,26	2.563.563,07	12.145.007,01	
B.1.		41.086,20	41.500,00	52.556,39	75.221,43	94.898,48	305.262,50	Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
1.	Perencanaan, Pemograman dan Anggaran, Pendataan serta Sosialisasi pengembangan kawasan	17.986,20	11.500,00	30.872,18	56.507,14	77.961,11	194.826,63	Asdep Perencanaan Pengembangan Kawasan
	a. Jumlah dokumen perencanaan, strategi dan kebijakan	4.496,55	2.555,56	28.161,65	54.323,81	75.843,94	165.381,51	
	b. Jumlah Dokumen Program dan Rencana Kerja serta Anggaran Pengembangan Kawasan	6.744,83	2.555,56	774,44	623,81	793,94	11.492,57	
	c. Jumlah Dokumen Data dan Informasi serta Sosialisasi pengembangan kawasan	6.744,83	6.388,89	1.936,09	1.559,52	1.323,23	17.952,56	
2.	Fasilitasi Penyediaan Prasarana Kawasan	6.200,00	9.300,00	8.131,58	7.797,62	7.674,75	39.103,95	Asdep Penyediaan Prasarana Kawasan
	a. Jumlah dokumen data potensi lahan dan prasarana kawasan	476,92	1.094,12	1.161,65	1.247,62	1.323,23	5.303,55	
	b. Jumlah dokumen perencanaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan	1.907,69	2.735,29	2.323,31	2.183,33	2.117,17	11.266,80	
	c. Jumlah dokumen terkait penyediaan lahan untuk mendukung pembangunan rumah umum	1.907,69	2.735,29	2.323,31	2.183,33	2.117,17	11.266,80	
	d. Jumlah dokumen terkait fasilitasi pembangunan Prasarana yang dapat mendorong pembangunan rumah umum	1.907,69	2.735,29	2.323,31	2.183,33	2.117,17	11.266,80	
3.	Fasilitasi kerjasama antar lembaga	6.600,00	6.600,00	3.484,96	2.807,14	2.381,82	21.873,92	Asdep Kerjasama Antar Lembaga
	a. Jumlah dokumen kerjasama Pemerintah dan Swasta	2.200,00	2.200,00	1.161,65	935,71	793,94	7.291,31	
	b. Jumlah dokumen kerjasama Pemerintah Pusat-Daerah dan Antar Daerah	2.200,00	2.200,00	1.161,65	935,71	793,94	7.291,31	
	c. Jumlah dokumen kerjasama Swasta dan Masyarakat	2.200,00	2.200,00	1.161,65	935,71	793,94	7.291,31	
4.	Pembinaan Pengelolaan Prasarana Kawasan	5.300,00	7.500,00	5.421,05	4.366,67	3.705,05	26.292,77	Asdep Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan
	a. Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Prasarana Rumah Susun dan Rumah Tapak	1.766,67	2.500,00	1.936,09	1.559,52	1.058,59	8.820,87	
	b. Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas	1.766,67	4.166,67	1.548,87	1.247,62	1.058,59	9.788,41	
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Pemasaran dan Pelayanan Konsumen	1.766,67	833,33	1.936,09	1.559,52	1.587,88	7.683,49	

No	Kegiatan/Indikator	Anggaran						Unit Kerja
		2010	2011	2012	2013	2014	Total	
5.	Pemantauan, evaluasi, pengkajian, analisis dan pelaporan kinerja bidang pengembangan kawasan	5.000,00	6.600,00	4.646,62	3.742,86	3.175,76	23.165,23	Asdep Evaluasi Kawasan
	a. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Bidang Pengembangan Kawasan	2.142,86	2.538,46	1.548,87	1.247,62	1.058,59	8.536,40	
	b. Jumlah Dokumen Pengembangan Kebijakan dan Pengkajian di bidang Pengembangan Kawasan	1.428,57	2.030,77	1.548,87	1.247,62	1.058,59	7.314,42	
	c. Jumlah Laporan Kinerja Periodik Deputi Bidang Pengembangan Kawasan	1.428,57	2.030,77	1.548,87	1.247,62	1.058,59	7.314,42	
B.2.		36.211,18	38.752,50	47.020,00	48.020,00	48.770,00	218.773,68	Deputi Bidang Perumahan Swadaya
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Pendataan dan Sosialisasi Kebijakan Perumahan Swadaya	11.841,18	11.592,50	14.020,00	14.220,00	14.270,00	65.943,68	Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya
	a. Jumlah dokumen perencanaan, strategi dan regulasi bidang perumahan swadaya	750,00	2.450,00	3.100,00	3.050,00	3.100,00	12.450,00	
	b. Jumlah dokumen program dan Penganggaran bidang perumahan swadaya	6.351,18	6.551,18	7.520,00	7.570,00	7.820,00	35.812,36	
	c. Jumlah laporan pendataan dan sosialisasi perumahan swadaya.	4.740,00	2.591,32	3.400,00	3.600,00	3.350,00	17.681,32	
2.	Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya Perumahan Swadaya	6.200,00	3.565,00	3.000,00	3.450,00	3.850,00	20.065,00	Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya
	a. Jumlah masukan teknis pelaksanaan kebijakan dan NSPK yang terkait peningkatan akses serta pemanfaatan sumberdaya perumahan swadaya	4.000,00	1.250,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	12.000,00	
	b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta kegiatan penunjang lainnya terkait peningkatan akses dan pemanfaatan sumberdaya perumahan swadaya	2.200,00	2.315,00	1.000,00	1.200,00	1.350,00	8.065,00	
	c. Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan PSU Perumahan Swadaya	-	-	-	-	-	-	
3.	Fasilitasi Pra-sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi	-	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	22.500,00	Asisten Deputi Kemitraan Dan Keswadayaan Perumahan
	a. Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi pra sertifikasi	-	2.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	13.500,00	
	b. Jumlah Pendampingan pasca sertifikasi	-	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	9.000,00	
4	Kegiatan Kemitraan dan Keswadayaan dalam Penyelenggaraan Perumahan Swadaya	6.150,00	7.035,00	8.000,00	8.150,00	8.300,00	37.635,00	
	a. Jumlah masukan teknis perumusan kebijakan kemitraan dan keswadayaan perumahan	1.200,00	600,00	1.400,00	1.150,00	800,00	5.150,00	Asisten Deputi Fasilitas dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya
	b. Jumlah forum kemitraan perumahan swadaya	-	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	
	c. Jumlah dokumen kerja sama	-	700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	6.100,00	
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan kebijakan keswadayaan perumahan	4.950,00	5.735,00	3.000,00	3.400,00	3.900,00	20.985,00	
5	Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya	6.025,00	6.150,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	36.475,00	Asisten Deputi Fasilitas dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya
	a. Jumlah masukan teknis rumusan kebijakan, regulasi dan NSPK terkait peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Perumahan swadaya	1.800,00	1.800,00	4.000,00	3.900,00	3.850,00	15.350,00	
	b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta kegiatan penunjang lainnya terkait peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan Swadaya	4.225,00	4.350,00	1.900,00	2.100,00	2.250,00	14.825,00	
	c. Jumlah laporan Wasdal peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan Swadaya	-	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
	d. Jumlah Fasilitas dan Simulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya	-	-	-	-	-	-	
	e. Jumlah Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	-	-	-	-	-	-	

No	Kegiatan/Indikator	Anggaran						Unit Kerja
		2010	2011	2012	2013	2014	Total	
6	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan Swadaya	5.995,00	5.910,00	8.000,00	8.100,00	8.150,00	36.155,00	Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya
	a. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja bidang perumahan swadaya	800,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.300,00	
	b. Jumlah kajian pelaksanaan kebijakan perumahan swadaya	3.520,00	3.150,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	14.370,00	
	c. Jumlah laporan periodik Deputi Bidang Perumahan Swadaya	1.675,00	260,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	9.485,00	
B.3.		38.961,00	39.500,00	49.000,00	49.700,00	49.700,00	226.861,00	Deputi Bidang Perumahan Formal
1.	Perencanaan Perumahan Formal	7.792,20	10.800,00	13.600,00	13.740,00	13.740,00	59.672,20	Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Formal
	a. Jumlah Laporan Perencanaan dan Strategi Perumahan Formal	2.337,65	2.700,00	4.425,00	4.495,00	4.495,00	18.452,65	
	b. Jumlah Laporan Program dan Penganggaran Perumahan Formal	2.337,65	6.100,00	6.962,50	6.997,50	6.997,50	29.395,15	
	c. Jumlah Laporan Pendataan dan Sosialisasi Perumahan Formal	3.116,90	2.000,00	2.212,50	2.247,50	2.247,50	11.824,40	
2.	Dukungan Penyediaan Perumahan Formal	8.571,42	8.550,00	8.850,00	8.990,00	8.990,00	43.951,42	Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun Dan Rumah Tapak
	a. Jumlah Laporan Fasilitas Penyediaan Rumah Susun	3.116,88	3.407,00	2.950,00	2.996,67	2.996,67	15.467,21	
	b. Jumlah Laporan Fasilitas Penyediaan Rumah Tapak	3.116,88	3.099,00	4.425,00	4.495,00	4.495,00	19.630,88	
	c. Jumlah Laporan Fasilitas Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas	2.337,66	2.044,00	1.475,00	1.498,33	1.498,33	8.853,33	
3.	Standardisasi Perumahan Formal	7.012,98	6.650,00	8.850,00	8.990,00	8.990,00	40.492,98	Asisten Deputi Fasilitas Standardisasi Perumahan Formal
	a. Jumlah Laporan Fasilitas standardisasi Rumah Susun	3.116,88	2.044,00	2.950,00	2.996,67	2.996,67	14.104,21	
	b. Jumlah Laporan Fasilitas Standardisasi Rumah Tapak	3.116,88	2.044,00	2.950,00	2.996,67	2.996,67	14.104,21	
	c. Jumlah Laporan Fasilitas Standardisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas	779,22	2.562,00	2.950,00	2.996,67	2.996,67	12.284,55	
4.	Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Kerjasama-Kemitraan Perumahan Formal	7.792,20	6.750,00	8.850,00	8.990,00	8.990,00	41.372,20	Asisten Deputi Pengembangan Kerjasama Dan Kemitraan
	a. Jumlah Laporan Fasilitas Kerjasama Pemerintah dengan Pemerintah	3.116,88	2.662,00	3.687,50	3.745,83	3.745,83	16.958,05	
	b. Jumlah Laporan Fasilitas Kemitraan Badan Usaha	2.337,66	2.725,00	2.950,00	2.996,67	2.996,67	14.005,99	
	c. Jumlah Laporan Fasilitas Kemitraan Badan Nirlaba	2.337,66	1.363,00	2.212,50	2.247,50	2.247,50	10.408,16	
5.	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan Formal	7.792,20	6.750,00	8.850,00	8.990,00	8.990,00	41.372,20	Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal
	a. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Formal	3.116,88	1.363,00	2.212,50	2.247,50	2.247,50	11.187,38	
	b. Jumlah Laporan Pengkajian Perumahan Formal	3.116,88	4.024,00	4.425,00	4.495,00	4.495,00	20.555,88	
	c. Jumlah Laporan Analisa dan Pelaporan Perumahan Formal	1.558,44	1.363,00	2.212,50	2.247,50	2.247,50	9.628,94	
B.4.		618.276,71	2.368.937,50	3.744.994,20	2.291.706,83	2.370.194,59	11.394.109,83	Pusat Pengembangan Perumahan
1	Fasilitas pembangunan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman							Pusat Pengembangan Perumahan
	Jumlah unit rumah sejahtera yang terbangun melalui penyediaan PSU Kawasan	64.840,00	731.312,50	906.250,00	1.260.100,00	1.412.500,00	4.375.002,50	
2	Fasilitas dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh						-	
	Luasan lingkungan permukiman kumuh menjadi berkurang	75.000,00	144.781,32	240.000,00	280.000,00	288.000,00	1.027.781,32	
3	Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya						-	
	Jumlah fasilitas dan stimulasi pembangunan PSU Perumahan Swadaya	51.000,00	50.000,00	81.250,00	37.500,00	22.500,00	242.250,00	
4	Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya						-	
	Jumlah Fasilitas dan Simulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya	20.000,00	141.343,69	178.750,00	115.500,00	105.000,00	560.593,69	
5	Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya						-	
	Jumlah Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	100.000,00	62.500,00	97.500,00	4.500,00	3.500,00	268.000,00	
6	Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)						-	
	Jumlah Rusunawa Terbangun	255.779,49	1.200.000,00	2.160.000,00	485.220,51	459.000,00	4.560.000,00	

No	Kegiatan/Indikator	Anggaran						Unit Kerja
		2010	2011	2012	2013	2014	Total	
7	Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus						-	
	Jumlah Rumah Khusus Terbangun	29.306,73	36.000,00	66.244,20	93.886,32	64.694,59	290.131,84	
8	Dukungan pelaksanaan operasionalisasi kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman							
	Layanan perkantoran	22.350,49	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	70.350,49	
C	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.877,00	57.000,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	355.077,00	
C.1		50.877,00	57.000,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	355.077,00	Deputi Bidang Pembiayaan
1	Perencanaan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	13.397,00	13.550,00	43.300,00	40.400,00	37.500,00	148.147,00	Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan
a.	Jumlah dokumen masukan teknis, rumusan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	4.530,00	2.450,00	5.600,00	6.050,00	6.500,00	25.130,00	
b.	Jumlah koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi rumusan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	8.217,00	10.500,00	36.300,00	32.800,00	29.300,00	117.117,00	
c.	Jumlah pemantauan, analisis dan evaluasi rumusan kebijakan, program, dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	650,00	600,00	1.400,00	1.550,00	1.700,00	5.900,00	
2	Pengembangan fasilitasi dan inovasi pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	6.150,00	6.150,00	10.400,00	11.150,00	11.900,00	45.750,00	Asisten Deputi Fasilitasi Dan Inovasi Pembiayaan
a.	Jumlah dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan pengembangan skim dan mekanisme pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	3.150,00	4.200,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	22.650,00	
b.	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penyiapan rumusan pengembangan skim dan mekanisme pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	2.400,00	1.500,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	17.400,00	
c.	Jumlah pemantuan, analisis dan evaluasi pelaksanaan skim dan mekanisme pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	600,00	450,00	1.400,00	1.550,00	1.700,00	5.700,00	
3	Pengembangan Kerjasama Pembiayaan dan Investasi Perumahan dan kawasan permukiman	20.100,00	24.800,00	10.400,00	11.150,00	11.900,00	78.350,00	Asisten Deputi Kerjasama Pembiayaan Dan Investasi
a.	Jumlah dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan pengembangan kerjasama pembiayaan dan investasi perumahan dan kawasan permukiman	5.200,00	6.250,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	26.750,00	
b.	Jumlah koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembiayaan dan investasi perumahan dan kawasan permukiman.	8.850,00	10.300,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	32.650,00	
c.	Jumlah pemantuan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembiayaan dan investasi perumahan dan kawasan permukiman	6.050,00	8.250,00	1.400,00	1.550,00	1.700,00	18.950,00	
4	Pengeralahan dan pendayagunaan Sumber-sumber Pembiayaan Perumahan dan kawasan permukiman	6.500,00	6.500,00	10.400,00	11.150,00	11.900,00	46.450,00	Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan
a.	Jumlah dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan pengeralahan dan pendayagunaan sumber – sumber pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	3.600,00	4.250,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	23.150,00	
b.	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pengeralahan dan pendayagunaan sumber – sumber pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	1.900,00	1.350,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	16.750,00	
c.	Jumlah pemantuan, analisis, dan evaluasi pengeralahan dan pendayagunaan sumber – sumber pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	1.000,00	900,00	1.400,00	1.550,00	1.700,00	6.550,00	

No	Kegiatan/Indikator	Anggaran						Unit Kerja
		2010	2011	2012	2013	2014	Total	
5	Evaluasi, pelaporan dan pengkajian pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.	4.730,00	6.000,00	7.900,00	8.550,00	9.200,00	36.380,00	Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan
	a. Jumlah dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan evaluasi pembiayaan	4.730,00	1.600,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	16.530,00	
	b. Jumlah koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	-	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	13.400,00	
	c. Jumlah analisis dan laporan hasil pelaksanaan kebijakan dan program pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	-	1.200,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	6.450,00	
	TOTAL BA 091	964.518,42	2.759.490,00	4.199.380,00	2.818.618,05	2.952.474,53	13.694.481,00	
II	ANGGARAN SUBSIDI DAN TRANSFER (BA 999)							
1	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	2.683.049,00	3.571.000,00	4.709.252,75	4.709.252,75	5.027.445,50	20.700.000,00	BLU-PPP
	a. Jumlah pembiayaan KPR Rumah Sejahtera Tapak	1.863.228,47	2.510.859,38	3.341.023,91	3.181.927,53	3.341.023,91	14.238.063,20	
	b. Jumlah pembiayaan KPR Satuan Rumah Sejahtera Susun Milik	372.645,69	557.968,75	795.481,88	954.578,26	1.113.674,64	3.794.349,22	
	c. Jumlah pembiayaan KPRS/KPRS Mikro	447.174,83	502.171,88	572.746,96	572.746,96	572.746,96	2.667.587,58	
2	Fasilitasi Pembayaran dan penyelesaian Subsidi Tahun 2008 – 2010	416.000,00	696.170,00	-	-	-	1.112.170,00	Asisten Deputi Fasilitasi Dan Inovasi Pembiayaan
	Jumlah pembayaran dan penyelesaian subsidi tahun 2008 - 2010	416.000,00	696.170,00	-	-	-	1.112.170,00	
	TOTAL BA 999	3.099.049,00	4.267.170,00	4.709.252,75	4.709.252,75	5.027.445,50	21.812.170,00	
III	DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
	Dak Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							Pemerintah Kab./Kota penerima DAK
	Terlaksana DAK perumahan berupa fasilitasi dan stimulasi pembangunan PSU Kawasan perumahan dan permukiman	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL Anggaran DAK	-	-	-	-	-	-	
IV	PSO BIDANG PERUMAHAN							
	Kewajiban pelayanan publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman							BUMN yang Ditunjuk sebagai Pelaksana PSO Perumahan
	1. Terwujud benchmark biaya produksi rumah layak huni	-	-	1.250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	
	2. Terwujud land banking untuk pembangunan rumah layak huni	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL Anggaran PSO	-	-	1.250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	

*) Sesuai dengan RPJMN Tahun 2010-2014, pagu anggaran untuk kegiatan Pembiayaan Perumahan sebesar Rp 20,7 Triliun (TA 2010-2014). Pagu anggaran tersebut tidak mencukupi untuk pencapaian target penerbitan KPR Rumah Sejahtera sesuai dengan target RPJMN 2010-2014 sebanyak 1,35 Juta unit. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan skim pembiayaan perumahan yaitu dari skim subsidi (subsidi selisih bunga atau bantuan uang muka) menjadi skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mengacu kepada skim baru masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 22,39 Triliun.

SANDINGAN TARGET DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
ANTARA RPJMN 2010-2014 DENGAN REVISI RENSTRA KEMENPERA 2010-2014

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TARGET						ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar)						Keterangan
			2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
A	BA 091														
I	PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA								127,61	156,63	242,46	303,33	341,35	1.171,4	
	<i>Usulan Revisi</i>								179,11	213,80	223,41	271,57	306,51	1.194,4	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya								127,61	156,63	242,46	303,33	341,35	1.171,4	
	<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat</i>								179,11	213,80	223,41	271,57	306,51	1.194,4	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								2.185,73	2.520,46	3.874,52	1.679,37	1.851,02	12.111,1	
	<i>Usulan Revisi</i>								734,54	2.488,69	3.893,57	2.464,65	2.563,56	12.145,0	
1	Pembangunan rumah susun sederhana sewa	twin block	100	100	180	-	-	380	1.200,00	1.200,00	2.160,00	-	-	4.560,0	Total jumlah sasaran dan Alokasi anggaran sesuai dengan RPJMN, walaupun breakdown per tahun berbeda.
	<i>Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa</i>	twin block	49	100	180	51	-	380	255,78	1.200,00	2.160,00	485,22	459,00	4.560,0	
2	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya	unit	7.500	12.500	16.250	7.500	6.250	50.000	75,00	125,00	178,75	82,50	75,00	536,3	Target dan Anggaran Tahun 2013-2014 lebih tinggi dari RPJMN untuk memenuhi kekurangan alokasi di tahun 2010 dalam rangka memenuhi Total Sasaran Tahun 2010-2014
	<i>Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan</i>	unit	2.000	12.500	16.250	10.500	8.750	50.000	20,00	141,34	178,75	115,50	105,00	560,6	
3	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	unit	7.500	12.500	16.250	7.500	6.250	50.000	37,50	62,50	97,50	45,00	43,75	286,3	Target dan Anggaran Tahun 2012-2014 lebih rendah dari RPJMN karena sudah teralokasi di Tahun 2010.
	<i>Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya</i>	unit	20.000	12.500	15.000	1.500	1.000	50.000	100,00	62,50	97,50	4,50	3,50	268,0	
4	Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan	unit	90.374	117.010	145.000	161.616	186.000	700.000	564,84	731,31	906,25	1.010,10	1.162,50	4.375,0	Total jumlah sasaran dan Alokasi anggaran sesuai dengan RPJMN, walaupun breakdown per tahun berbeda.
	<i>Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan</i>	unit	10.374	117.010	145.000	201.616	226.000	700.000	64,84	731,31	906,25	1.260,10	1.412,50	4.375,0	
5	Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya	unit	7.500	12.500	16.250	7.500	6.250	50.000	30,00	50,00	81,25	37,50	37,50	236,3	Target dan Anggaran Tahun 2014 lebih rendah dari RPJMN karena sudah teralokasi di Tahun 2010.
	<i>Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya</i>	unit	10.000	12.500	16.250	7.500	3.750	50.000	51,00	50,00	81,25	37,50	22,50	242,3	
6	Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	Ha	50	100	150	175	180	655	75,00	160,00	240,00	280,00	288,00	1.043,0	Tidak ada perubahan target dan anggaran.
	<i>Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh</i>	Ha	50	100	150	175	180	655	75,00	144,78	240,00	280,00	288,00	1.027,8	

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TARGET						ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar)						Keterangan
			2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
7	Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi	unit	-	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000	-	2,25	3,00	3,00	3,75	12,0	Jumlah target tetap, tetapi alokasi anggaran meningkat karena perubahan harga satuan.
	<i>Fasilitasi Pra-sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi</i>	bidang	-	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000	-	4,50	6,00	6,00	6,00	22,5	
8	Fasilitasi pembangunan rumah khusus	unit	250	750	1.050	1.350	1.600	5.000	42,87	28,88	47,25	60,75	80,00	259,7	Jumlah target tetap, tetapi alokasi anggaran meningkat karena perubahan harga satuan.
	<i>Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus</i>		1.000	750	1.050	1.350	850	5.000	29,31	36,00	66,24	93,89	64,69	290,1	
9	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman	peraturan perundangan	4	4	4	4	4	20	160,52	160,52	160,52	160,52	160,52	802,6	
	<i>Usulan Revisi</i>								138,61	118,25	157,58	181,94	202,37	798,7	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								82,40	82,40	82,40	82,40	82,40	412,0	
	<i>Usulan Revisi</i>								50,88	57,00	82,40	82,40	82,40	355,1	
1	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman	peraturan perundangan	2	2	2	2	2	10	82,40	82,40	82,40	82,40	82,40	412,0	
	<i>Usulan Revisi</i>								50,88	57,00	82,40	82,40	82,40	355,1	
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 091)									2.395,7	2.759,5	4.199,4	2.065,1	2.274,8	13.694,5	
Usulan Revisi									964,5	2.759,5	4.199,4	2.818,6	2.952,5	13.694,5	
B.	BA 999														
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								4.163,51	3.840,00	4.440,00	4.440,00	4.740,00	21.623,5	
	<i>Usulan Revisi</i>								3.099,05	4.267,17	4.709,25	4.709,25	5.027,45	21.812,2	
1	Bantuan Subsidi Perumahan	unit	210.000	250.000	290.000	290.000	310.000	1.350.000	3.240,00	3.840,00	4.440,00	4.440,00	4.740,00	20.700,00	Jumlah target dan anggaran masih sama dengan RPJMN, sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar
	<i>Pembiayaan Perumahan</i>	unit	210.000	250.000	290.000	300.000	300.000	1.350.000	2.683,05	3.571,00	4.709,25	4.709,25	5.027,45	20.700,0	
2	Tunggakan Subsidi Perumahan Tahun 2008-2009	unit	187.006	-	-	-	-	187.006	923,51	-	-	-	-	923,51	Alokasi anggaran meningkat sesuai DIPA tahun 2010 dan Tahun 2011
	<i>Pembayaran dan penyelesaian Subsidi Tahun 2008 – 2010</i>	unit	277.025	267.777	-	-	-	544.802	416,00	696,17	-	-	-	1.112,2	
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 999)									4.163,5	3.840,0	4.440,0	4.440,0	4.740,0	21.623,5	
Usulan Revisi									3.099,0	4.267,2	4.709,3	4.709,3	5.027,4	21.812,2	
C. DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN															
1	Dak Bidang Perumahan dan Permukiman	Unit Rumah	-	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000	-	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	Dalam usulan revisi alokasi anggaran tidak dicantumkan karena tidak termasuk APBDN

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TARGET						ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar)						Keterangan
			2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
	<i>Dak Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	Unit Rumah	-	24.000	90.000	90.000	116.000	320.000	-	-	-	-	-	-	termasuk APBDN
D.	PSO BIDANG PERUMAHAN														
1	Kewajiban pelayanan publik di bidang perumahan	Unit	-	20.000	25.000	25.000	30.000	#REF!	-	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.500,00	5.000,00	Tidak ada perubahan target dan anggaran.
	<i>Kewajiban pelayanan publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman</i>	Unit	-	20.000	25.000	25.000	30.000	100.000	-	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.500,00	5.000,00	

Keterangan:		Target dan alokasi anggaran per program versi awal
		Target dan alokasi anggaran per program versi perubahan
		Target dan alokasi anggaran per kegiatan versi perubahan
		Target dan alokasi anggaran per kegiatan versi awal
		Target dan alokasi anggaran per bagian anggaran versi perubahan
		Target dan alokasi anggaran per bagian anggaran versi awal

SANDINGAN TARGET DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
ANTARA RPJMN 2010-2014 DENGAN REVISI RENSTRA KEMENPERA 2010-2014

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TARGET						ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar)						Keterangan
			2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
A	BA 091														
I	PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA								127,61	156,63	242,46	303,33	341,35	1.171,4	
	<i>Usulan Revisi</i>								179,11	213,80	223,41	271,57	306,51	1.194,4	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya								127,61	156,63	242,46	303,33	341,35	1.171,4	
	<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat</i>								179,11	213,80	223,41	271,57	306,51	1.194,4	
	<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis</i>								55,88	56,32	69,30	84,58	90,00	356,1	
	<i>Perencanaan dan penganggaran pembangunan</i>								98,93	138,18	129,15	158,78	186,38	711,4	
	<i>Peningkatan Produk Hukum dan Kepegawaian</i>								16,43	10,80	15,48	17,11	18,93	78,8	
	<i>Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas</i>								2,86	3,50	4,48	5,10	5,20	21,1	
	<i>Dukungan pengembangan kebijakan pembangunan</i>								5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	27,0	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								2.185,73	2.520,46	3.874,52	1.679,37	1.851,02	12.111,1	
	<i>Usulan Revisi</i>								734,54	2.488,69	3.893,57	2.464,65	2.563,56	12.145,0	
1	Pembangunan rumah susun sederhana sewa	twin block	100	100	180	-	-	380	1.200,00	1.200,00	2.160,00	-	-	4.560,0	Total jumlah sasaran dan Alokasi anggaran sesuai dengan RPJMN, walaupun breakdown per tahun berbeda.
	<i>Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa</i>	twin block	49	100	180	51	-	380	255,78	1.200,00	2.160,00	485,22	459,00	4.560,0	
2	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya	unit	7.500	12.500	16.250	7.500	6.250	50.000	75,00	125,00	178,75	82,50	75,00	536,3	Target dan Anggaran Tahun 2013-2014 lebih tinggi dari RPJMN untuk memenuhi kekurangan alokasi di tahun 2010 dalam rangka memenuhi Total Sasaran Tahun 2010-2014
	<i>Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan</i>	unit	2.000	12.500	16.250	10.500	8.750	50.000	20,00	141,34	178,75	115,50	105,00	560,6	
3	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	unit	7.500	12.500	16.250	7.500	6.250	50.000	37,50	62,50	97,50	45,00	43,75	286,3	Target dan Anggaran Tahun 2012-2014 lebih rendah dari RPJMN karena sudah teralokasi di Tahun 2010.
	<i>Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya</i>	unit	20.000	12.500	16.250	750	500	50.000	100,00	62,50	97,50	4,50	3,50	268,0	
4	Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan	unit	90.374	117.010	145.000	161.616	186.000	700.000	564,84	731,31	906,25	1.010,10	1.162,50	4.375,0	Total jumlah sasaran dan Alokasi anggaran sesuai dengan RPJMN,

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TARGET						ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar)						Keterangan
			2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
	Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan	unit	10.374	117.010	145.000	201.616	226.000	700.000	64,84	731,31	906,25	1.260,10	1.412,50	4.375,0	walaupun breakdown per tahun berbeda.
5	Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya	unit	7.500	12.500	16.250	7.500	6.250	50.000	30,00	50,00	81,25	37,50	37,50	236,3	Target dan Anggaran Tahun 2014 lebih rendah dari RPJMN karena sudah teralokasi di Tahun 2010.
	Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya	unit	10.000	12.500	16.250	7.500	3.750	50.000	51,00	50,00	81,25	37,50	22,50	242,3	
6	Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	Ha	50	100	150	175	180	655	75,00	160,00	240,00	280,00	288,00	1.043,0	Tidak ada perubahan target dan anggaran.
	Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh	Ha	50	100	150	175	180	655	75,00	144,78	240,00	280,00	288,00	1.027,8	
7	Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi	unit	-	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000	-	2,25	3,00	3,00	3,75	12,0	Jumlah target tetap, tetapi alokasi anggaran meningkat karena perubahan harga satuan.
	Fasilitasi Pra-sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi	bidang	-	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000	-	4,50	6,00	6,00	6,00	22,5	
8	Fasilitasi pembangunan rumah khusus	unit	250	750	1.050	1.350	1.600	5.000	42,87	28,88	47,25	60,75	80,00	259,7	Jumlah target tetap, tetapi alokasi anggaran meningkat karena perubahan harga satuan.
	Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus		1.000	750	1.050	1.350	850	5.000	29,31	36,00	66,24	93,89	64,69	290,1	
9	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman	peraturan perundangan	4	4	4	4	4	20	160,52	160,52	160,52	160,52	160,52	802,6	
	Usulan Revisi								138,61	118,25	157,58	181,94	202,37	798,7	
	Deputi Bidang Pengembangan Kawasan								41,09	41,50	52,56	75,22	94,90	305,3	
	Perencanaan, Pemograman dan Anggaran, Pendataan serta Sosialisasi								17,99	11,50	30,87	56,51	77,96	194,8	
	Fasilitasi Penyediaan Prasarana Kawasan								6,20	9,30	8,13	7,80	7,67	39,1	
	Fasilitasi kerjasama antar								6,60	6,60	3,48	2,81	2,38	21,9	
	Pembinaan Pengelolaan Prasarana Kawasan								5,30	7,50	5,42	4,37	3,71	26,3	
	Pemantauan, evaluasi, pengkajian, analisis dan pelaporan kinerja bidang								5,00	6,60	4,65	3,74	3,18	23,2	
	Deputi Bidang Perumahan Swadaya								36,21	34,25	41,02	42,02	42,77	196,3	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Pendataan dan Sosialisasi Kebijakan								11,84	11,59	14,02	14,22	14,27	65,9	
	Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya								6,20	3,57	3,00	3,45	3,85	20,1	
	Kegiatan Kemitraan dan Keswadayaan dalam Penyelenggaraan								6,15	7,04	8,00	8,15	8,30	37,6	

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TARGET						ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar)						Keterangan
			2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
	Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Komunitas								6,03	6,15	8,00	8,10	8,20	36,5	
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan Swadaya								6,00	5,91	8,00	8,10	8,15	36,2	
	Deputi Bidang Perumahan Formal								38,96	39,50	49,00	49,70	49,70	226,9	
	Perencanaan Perumahan								7,79	11,55	13,60	13,74	13,74	60,4	
	Dukungan Penyediaan Perumahan Formal								8,57	6,95	8,85	8,99	8,99	42,4	
	Standardisasi Perumahan								7,01	7,00	8,85	8,99	8,99	40,8	
	Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Kerjasama-Kemitraan Perumahan								7,79	7,00	8,85	8,99	8,99	41,6	
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan Formal								7,79	7,00	8,85	8,99	8,99	41,6	
	Pusat Pengembangan								22,35	3,00	15,00	15,00	15,00	70,4	
	Dukungan pelaksanaan operasionalisasi kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman								22,35	3,00	15,00	15,00	15,00	70,4	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								82,40	82,40	82,40	82,40	82,40	412,0	
	Usulan Revisi								50,88	57,00	82,40	82,40	82,40	355,1	
1	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman	peraturan perundangan	2	2	2	2	2	10	82,40	82,40	82,40	82,40	82,40	412,0	
	Usulan Revisi								50,88	57,00	82,40	82,40	82,40	355,1	
	Deputi Bidang Pembiayaan								39,88	40,00	82,40	82,40	82,40	327,1	
	Perencanaan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan								13,40	13,55	43,30	40,40	37,50	148,1	
	Pengembangan fasilitas dan inovasi pembiayaan perumahan dan kawasan								6,15	6,15	10,40	11,15	11,90	45,8	
	Pengembangan Kerjasama Pembiayaan dan Investasi Perumahan dan kawasan								9,10	7,80	10,40	11,15	11,90	50,4	
	Pengerahan dan pendayagunaan Sumber-sumber Pembiayaan								6,50	6,50	10,40	11,15	11,90	46,5	
	Evaluasi, pelaporan dan pengkajian pembiayaan perumahan dan kawasan								4,73	6,00	7,90	8,55	9,20	36,4	
	Dukungan Operasionalisasi Penyaluran Pembiayaan								11,00	17,00	-	-	-	28,0	

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TARGET						ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar)						Keterangan
			2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 091)									2.395,7	2.759,5	4.199,4	2.065,1	2.274,8	13.694,5	
Usulan Revisi									964,5	2.759,5	4.199,4	2.818,6	2.952,5	13.694,5	
B.	BA 999														
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								4.163,51	3.840,00	4.440,00	4.440,00	4.740,00	21.623,5	
	Usulan Revisi								3.099,05	4.267,17	4.709,25	4.709,25	5.027,45	21.812,2	
1	Bantuan Subsidi Perumahan	unit	210.000	250.000	290.000	290.000	310.000	1.350.000	3.240,00	3.840,00	4.440,00	4.440,00	4.740,00	20.700,00	Jumlah target dan anggaran masih sama dengan RPJMN, sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar
	Pembiayaan Perumahan	unit	210.000	250.000	290.000	300.000	300.000	1.350.000	2.683,05	3.571,00	4.709,25	4.709,25	5.027,45	20.700,0	
2	Tunggakan Subsidi Perumahan Tahun 2008-2009	unit	187.006	-	-	-	-	187.006	923,51	-	-	-	-	923,51	Alokasi anggaran meningkat sesuai DIPA tahun 2010 dan Tahun 2011
	Pembayaran dan penyelesaian Subsidi Tahun 2008 – 2010	unit	277.025	267.777	-	-	-	544.802	416,00	696,17	-	-	-	1.112,2	
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 999)									4.163,5	3.840,0	4.440,0	4.440,0	4.740,0	21.623,5	
Usulan Revisi									3.099,0	4.267,2	4.709,3	4.709,3	5.027,4	21.812,2	
C. DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN															
1	Dak Bidang Perumahan dan Permukiman	Unit Rumah	-	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000	-	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	Dalam usulan revisi alokasi anggaran tidak dicantumkan karena tidak termasuk APBN
	Dak Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit Rumah	-	24.000	90.000	90.000	116.000	320.000	-	-	-	-	-	-	
D. PSO BIDANG PERUMAHAN															
1	Kewajiban pelayanan publik di bidang perumahan	Unit	-	20.000	25.000	25.000	30.000	#REF!	-	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.500,00	5.000,00	Tidak ada perubahan target dan anggaran.
	Kewajiban pelayanan publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman	Unit	-	20.000	25.000	25.000	30.000	100.000	-	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.500,00	5.000,00	

Keterangan:		Target dan alokasi anggaran per program versi awal
		Target dan alokasi anggaran per program versi perubahan
		Target dan alokasi anggaran per kegiatan versi perubahan
		Target dan alokasi anggaran per kegiatan versi awal
		Target dan alokasi anggaran per bagian anggaran versi perubahan
		Target dan alokasi anggaran per bagian anggaran versi awal